

DESAIN MATERI PENYULUHAN ANTI KORUPSI YANG MENARIK DAN EFEKTIF

Angel Gumala Afifah
angelafifah79@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan serta memperlemah sistem sosial dan ekonomi. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International, skor Indonesia masih berada pada kategori yang menunjukkan tingginya persepsi korupsi di sektor publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan.

Salah satu strategi penting adalah melalui penyuluhan anti korupsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, banyak kegiatan yang masih menggunakan metode ceramah konvensional sehingga kurang efektif dalam mempengaruhi perilaku peserta. Oleh karena itu, diperlukan desain materi yang menarik agar mampu mendorong perubahan sikap serta perilaku Masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi serta menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, banyak kegiatan penyuluhan yang masih menggunakan metode ceramah konvensional sehingga kurang menarik dan kurang efektif dalam mempengaruhi perilaku peserta. Oleh karena itu, diperlukan desain materi penyuluhan anti korupsi yang menarik dan efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan mampu mendorong perubahan sikap serta perilaku masyarakat.

Rumusan masalah essay ini Adalah bagaimana merancang materi penyuluhan anti korupsi yang menarik dan efektif sehingga mampu meningkatkan kesadaran serta membangun budaya integritas di masyarakat?

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk menganalisis konsep desain materi penyuluhan anti korupsi yang efektif, mengidentifikasi metode penyampaian yang menarik, serta memberikan rekomendasi strategi dalam pelaksanaan program penyuluhan anti korupsi.

2. Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori

2.1. Konsep Utama

Desain materi penyuluhan merupakan proses merancang pesan, media, dan metode komunikasi agar informasi dapat dipahami serta diterima oleh sasaran secara efektif. Dalam konteks pendidikan dan penyuluhan, desain materi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disusun secara menarik, mudah dipahami, serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. Materi yang dirancang dengan baik biasanya mempertimbangkan aspek visual, bahasa yang sederhana, serta relevansi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam penyuluhan anti korupsi, desain materi memiliki peran penting karena isu korupsi sering dianggap abstrak atau jauh dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, materi perlu dikemas dalam bentuk yang komunikatif, misalnya melalui ilustrasi kasus nyata, infografis, video edukasi, atau simulasi situasi yang dapat membantu audiens memahami dampak korupsi secara konkret. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap isu anti korupsi (Indawati, 2015).

Desain materi penyuluhan merupakan proses merancang pesan, media, dan metode komunikasi agar informasi dapat dipahami serta diterima oleh sasaran secara efektif. Materi yang dirancang dengan baik harus mempertimbangkan aspek visual, bahasa yang sederhana, serta relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penyuluhan anti korupsi, materi perlu dikemas secara komunikatif, misalnya melalui ilustrasi kasus nyata, infografis, atau video edukasi untuk membantu audiens memahami dampak korupsi secara konkret.

2.2. Teori Pendukung

Teori komunikasi persuasif merupakan salah satu landasan penting dalam merancang materi penyuluhan yang efektif. Komunikasi persuasif adalah proses

penyampaian pesan yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang melalui argumentasi yang logis maupun pendekatan emosional. Menurut Gass dan Seiter, komunikasi persuasif berperan dalam membentuk perubahan sikap melalui pesan yang dirancang secara strategis dan disampaikan melalui media yang tepat (Gass & Seiter, 2022). Dalam konteks penyuluhan anti korupsi, teori komunikasi persuasif digunakan untuk menyampaikan pesan tentang bahaya korupsi serta pentingnya nilai integritas kepada masyarakat. Materi penyuluhan yang disusun dengan pendekatan persuasif biasanya menggunakan contoh kasus nyata, cerita inspiratif, maupun ilustrasi visual yang mampu menarik perhatian audiens. Dengan demikian, audiens tidak hanya memahami informasi yang disampaikan, tetapi juga terdorong untuk mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap praktik korupsi. Teori komunikasi persuasif menjadi landasan penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang melalui argumentasi logis maupun pendekatan emosional. Selain itu, keterlibatan publik sangat krusial karena lembaga anti korupsi membutuhkan dukungan masyarakat luas untuk mensukseskan program-programnya. Penelitian juga menekankan pentingnya mengevaluasi fungsi edukasi pada komisi anti korupsi untuk memastikan integritas sektor publik tetap terjaga. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pesan yang dirancang secara persuasif dan disampaikan melalui media yang menarik dapat meningkatkan efektivitas kampanye anti korupsi serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas (Nurrezkina, 2024).

2.3. Penelitian Relevan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan penyuluhan anti korupsi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi serta membangun nilai integritas. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh desain materi, metode penyampaian, serta media komunikasi yang digunakan. Penelitian oleh Fajar dan Muriman (2018) menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan strategi preventif yang efektif untuk mencegah praktik korupsi melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta didik. Sementara itu, Huang, Hsiao, dan Shin-Lin (2021) menemukan bahwa penggunaan

metode studi kasus dapat meningkatkan motivasi belajar serta efektivitas pemahaman peserta terhadap isu korupsi secara konkret.

Pendekatan lain yang dikembangkan oleh Sumaryati, Suyadi, Nuryana, dan Asmorojati (2022) adalah model pendidikan berbasis proyek (*project-based learning*), yang terbukti meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami nilai integritas. Selain itu, penerapan *Theory of Planned Behaviour* dalam kebijakan pendidikan anti korupsi di Indonesia juga menjadi sorotan sebagai cara untuk memerangi korupsi secara sistematis.

3. Pembahasan / Analisis

3.1. Penyuluhan Anti Korupsi bagi Pelajar dan Mahasiswa

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan suatu negara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, serta menghambat terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif seperti pendidikan dan penyuluhan anti korupsi kepada generasi muda.

Melalui penyuluhan anti korupsi, pelajar dan mahasiswa dapat memahami berbagai bentuk korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyuapan, penyalahgunaan jabatan, dan penggelapan dana. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui dampak negatif korupsi terhadap pembangunan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memahami dampak tersebut, diharapkan generasi muda dapat menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial yang dapat merusak masa depan bangsa. Penyuluhan anti korupsi biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan, seperti seminar, diskusi, sosialisasi, maupun pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam kegiatan tersebut, pelajar dan mahasiswa diajak untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi serta cara mencegahnya. Pelajar dan mahasiswa perlu memahami berbagai bentuk korupsi seperti penyuapan dan penyalahgunaan jabatan agar menyadari bahwa korupsi adalah masalah moral yang merusak masa depan bangsa. Sebagai generasi penerus, mereka memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mendorong

budaya kejujuran dan transparansi . Metode pembelajaran yang interaktif dapat membantu mereka lebih memahami pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan penyuluhan juga dapat mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Pelajar dan mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dengan memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang bahaya korupsi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya kejujuran dan transparansi di masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan anti korupsi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai integritas dapat tertanam kuat dalam diri generasi muda. Secara keseluruhan, penyuluhan anti korupsi bagi pelajar dan mahasiswa merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang bersih dari praktik korupsi. Melalui pendidikan dan penyuluhan yang tepat, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta mendukung pembangunan bangsa yang adil dan sejahtera.

3.2. Penyuluhan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyuluhan anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dan memiliki peran besar dalam menjalankan pelayanan publik serta mengelola berbagai kebijakan dan sumber daya negara. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Penyuluhan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada ASN mengenai bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi yang dapat terjadi dalam birokrasi, serta konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Korupsi dalam lingkungan pemerintahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, gratifikasi, penggelapan anggaran, maupun praktik nepotisme. Tindakan tersebut tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penyuluhan anti korupsi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran ASN agar mampu menghindari serta menolak segala bentuk praktik koruptif dalam menjalankan tugasnya. Melalui penyuluhan ini, ASN diharapkan dapat memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat. Penyuluhan anti korupsi bagi ASN juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dasar integritas dalam lingkungan birokrasi. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan adanya pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai tersebut, ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi. Selain itu, penyuluhan ini juga memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga ASN dapat memahami batasan-batasan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kegiatan penyuluhan anti korupsi biasanya dilakukan melalui berbagai metode edukasi seperti seminar, pelatihan, sosialisasi kebijakan, serta diskusi mengenai kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi. Dalam kegiatan tersebut, ASN diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mencegah korupsi dalam proses administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran, maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan pendekatan edukatif ini, diharapkan ASN tidak hanya memahami teori mengenai anti korupsi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik kerja sehari-hari. Bagi ASN, penyuluhan bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya korupsi dalam birokrasi, seperti gratifikasi dan nepotisme. ASN dituntut memiliki integritas tinggi karena peran mereka yang besar dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara. Melalui metode edukasi yang tepat, diharapkan ASN mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik kerja sehari-hari.

Selain meningkatkan pengetahuan, penyuluhan anti korupsi juga bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas dalam instansi pemerintah. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta mengurangi peluang

terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini, setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dirinya sendiri sekaligus mengingatkan rekan kerja agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Secara keseluruhan, penyuluhan anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Melalui penyuluhan yang berkelanjutan, ASN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur pemerintah, diharapkan tercipta sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi Masyarakat.

3.3. Penyuluhan Anti Korupsi bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum

Penyuluhan anti korupsi bagi pelaku usaha dan masyarakat umum merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan mengurangi praktik korupsi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat luas dalam berbagai aktivitas, seperti proses perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa, maupun dalam kegiatan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyuluhan anti korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh agar semua pihak memahami bahaya dan dampak negatif dari tindakan korupsi serta memiliki kesadaran untuk menolak dan mencegahnya. Bagi pelaku usaha, penyuluhan anti korupsi sangat penting karena dunia bisnis sering kali bersentuhan langsung dengan kebijakan pemerintah dan berbagai proses administratif, seperti perizinan, tender proyek, serta kerja sama dengan instansi pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat menghadapi godaan atau tekanan untuk melakukan praktik yang tidak jujur, seperti memberikan suap, gratifikasi, atau melakukan kolusi demi mendapatkan keuntungan tertentu. Melalui penyuluhan anti korupsi, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta pentingnya menjalankan usaha secara jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha dapat membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan tanpa harus melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum. Pelaku usaha sering menghadapi godaan suap atau kolusi dalam proses perizinan dan tender proyek. Penyuluhan membantu mereka

menjalankan bisnis yang sehat tanpa melanggar hukum. Di sisi lain, masyarakat umum perlu diberdayakan agar berani menolak serta melaporkan praktik pungutan liar atau suap dalam pelayanan publik. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sangat penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, penyuluhan anti korupsi juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika dalam dunia usaha. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, dan persaingan yang sehat sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Ketika pelaku usaha menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akan tercipta iklim usaha yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, praktik bisnis yang bebas dari korupsi tidak hanya menguntungkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Sementara itu, penyuluhan anti korupsi bagi masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam mencegah korupsi. Masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem sosial yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dengan adanya penyuluhan, masyarakat dapat memahami berbagai bentuk korupsi yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau praktik suap dalam pelayanan publik. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik korupsi serta berani menolak dan melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Melalui penyuluhan anti korupsi, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajibannya, mereka akan lebih kritis terhadap kebijakan publik serta berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Secara keseluruhan, penyuluhan anti korupsi bagi pelaku usaha dan masyarakat umum merupakan langkah strategis dalam membangun budaya integritas di berbagai sektor kehidupan. Dengan memberikan pemahaman

yang baik mengenai bahaya korupsi serta pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab, diharapkan pelaku usaha dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang bersih dari praktik korupsi. Upaya ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat

4. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh desain materi dan metode penyampaian yang digunakan. Materi penyuluhan yang dirancang secara sederhana, relevan dengan kehidupan peserta, serta disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, penggunaan metode yang interaktif seperti *storytelling*, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, serta pemanfaatan media visual dan digital terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang partisipatif tidak hanya membuat kegiatan penyuluhan lebih menarik, tetapi juga membantu peserta untuk lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh desain materi yang sederhana, relevan, dan interaktif. Penggunaan metode seperti *storytelling*, diskusi kelompok, dan simulasi membantu peserta menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi secara lebih mendalam. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun budaya integritas yang kuat dan permanen di tengah masyarakat.

Selain aspek materi dan metode, keberhasilan penyuluhan juga dipengaruhi oleh strategi pelaksanaan program. Penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat, akan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan memungkinkan terciptanya lingkungan sosial yang mendukung terbentuknya budaya integritas dan perilaku antikorupsi di masyarakat. Dengan demikian, desain materi penyuluhan anti korupsi yang menarik dan efektif harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kejelasan materi, metode penyampaian yang interaktif, serta strategi implementasi yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan

dan menjadi faktor kunci dalam membangun kesadaran serta komitmen masyarakat untuk menolak praktik korupsi. Pada akhirnya, penyuluhan anti korupsi tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai definisi atau bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas. Apabila penyuluhan dilakukan secara konsisten dan terencana dengan baik, maka program ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih jujur, transparan, dan berintegritas serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Byrne, E., Arnold, A. K., & Nagano, F. (2010). Building Public Support for Anti-Corruption Efforts: Why Anti-Corruption Agencies Need to Communicate and Engage with the Public. Washington DC: World Bank / UNODC. <http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR/CorruptionWhitePaperpub31110screen.pdf>
- Cochrane, C. (2020). Teaching Integrity in the Public Sector: Evaluating and Reporting Anti-Corruption Commissions' Education Function. *Teaching Public Administration*. <https://doi.org/10.1177/0144739419851147>
- Disch, A., Vigeland, E., Sundet, G., & Gibson, S. (2009). Anti-Corruption Approaches: A Literature Review. Oslo: Norwegian Agency for Development Cooperation. <https://discuss.tp4.ir/uploads/default/original/2X/c/ca68080051f00cec27ae33d8469ff9da48448b3.pdf>
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption Through Anti-Corruption Education. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference*. <https://www.atlantis-press.com/article/25906037.pdf>
- Fritzen, S. A., & Basu, S. (2011). The Strategic Use of Public Information in Anti-Corruption Agencies: Evidence from the Asia-Pacific Region. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.616987>
- Huang, C. H., Hsiao, L. H. C., & Shin-Lin, K. O. (2021). Effect of Applying Case Method to Anti-Corruption Education on Learning Motivation and Learning Effectiveness. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*. https://www.rcis.ro/images/documente/rcis73_17.pdf
- Johnsøn, J., & Søreide, T. (2013). Methods for Learning What Works and Why in Anti-Corruption: An Introduction to Evaluation Methods for Practitioners. Bergen: Chr. Michelsen Institute. <https://www.cmi.no/publications/file/4876-methods-for-learning-what-works-and-why-in-anti.pdf>
- Johnsøn, J., Taxell, N., & Zaum, D. (2012). Mapping Evidence Gaps in Anti-Corruption: Assessing the State of the Operationally Relevant Evidence on Donors' Actions and Approaches to Reducing Corruption. Bergen: Chr.

Michelsen

Institute.

<https://www.cmi.no/publications/file/4624-mapping-evidence-gaps-in-anti-corruption.pdf>

Lituhayu, D., Rahman, A. Z., & Muluk, M. R. K. (2023). Anti-Corruption Education Policy Outputs for Combatting Corruption in Indonesia: Applying the Theory of Planned Behaviour. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*.
<https://journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/230>

Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-Corruption Action: A Project-Based Anti-Corruption Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>